

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Groups, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Astawa, I Gede Pantja, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Fadlil, Ahmad, *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Fauzan, Uzair & Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Pancasila Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Kaho, Josef Riwo, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans 1957, *What Is Justice?*, University Of Calofirnia, Berkeley And Los Angeles.
- Koesoemahatmadja, R.D.H., 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina cipta, Bandung.

Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, UNISIKA, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1995, *Empat Tulisan tentang Hukum*, Universitas Padjajaran, Bandung.

M.D., Moh. Mahfud, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1990, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muliawan, Jarot Widya, 2014, *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB*, STPN Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ranggawidjaja, Rosjidi dan Indra Perwira, 1986, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Citra Bhakti Akademika, Bandung.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Santoso, HM Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soehino, 2001, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solossa, Jacobus Perviddya, 2005, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta.

Suhandi Hamid, Edy dan Sibirin Malian, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*, UII Press, Yogyakarta.

Suharningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2012, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syarif dan Bhenyamin Hoessein, 2001, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2P-LIPI, Jakarta.

Widjja, H.A.W., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Abdul Gafar Karim (Ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar & Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Miftah Adi Ikhsanto & Wawan Mas'udi (edt) 2011, *Decentralized Governance: Sebagai Wujud Nyata Dari Sistem Kekuasaan Kesejahteraan Dan Demokrasi*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

Nelly Hikmah, 2013, "Tinjauan Yuridis Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.

Pratikno, 2010, “Desentralisasi Asimetris di Indonesia : Praktek Proyeksi, Jurusan Politik dan Pemerintahan”, *Hasil Penelitian*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Purwo Santoso, dkk, 2011, “Decentralized Governance : Sebagai Wujud Nyata dari Sistem Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi”, *Laporan Penelitian*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Sadu Wasistiono, 2010, “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan” *Jurnal Ilmu Politik AIP* No. 21 dengan tema “Dasarwasa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek”, Jakarta.

Muhammad Sapta Murti, “Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014

Paparan Tim Naskah Akademik Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur, 8 Januari 2015 di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

#### Internet

Laura C. Lawung, “Perlukah Otonomi Khusus Bagi Kalimantan Timur? Analisa dari Sudut Pandang Pendapatan Daerah dan Kondisi Ekonomi Daerah”, diakses dari [https://www.academia.edu/12610675/-Analisa\\_Kebutuhan\\_Otonomi\\_Khusus\\_bagi\\_Kalimantan\\_Timur](https://www.academia.edu/12610675/-Analisa_Kebutuhan_Otonomi_Khusus_bagi_Kalimantan_Timur) pada tanggal 22 April 2016 pukul 09.00 WIB.

Stefanus Arif Setiadi, “ Dana Bagi Hasil Riau Terima 979 Miliar “ diakses dari <http://--industri.-bisnis.com/read/-20151113/44/491989/--dana-bagi-hasil-tahun-ini--riau-hanya--terima-rp979-miliar>, diakses pada 10 Agustus-2016 pukul 13.00 WIB.

Dwi Apriani, 2016, “Sumatera Selatan Tagih Transparansi Dana Bagi Hasil” <http://mediaindonesia.com/news/read/34385/-pemprov-sumsel--tagih-transparansi-dana-bagi--hasil/2016-03-15#>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Provinsi Kaltim, 2016, <http://bpmpd.kaltimprov.go.id/?page=berita&id=50>, diakses tgl 20 juli 2016 pukul 10.00 WIB.

Bappeda Kalimantan Timur, “Profil Kalimantan Timur”, diakses dari <http://bappedakaltim.com/hal-profil-daerah-provinsi-kalimantan-timur.html> pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 20.00 WIB

Awaluddin Jalil, 2015,” Naskah Akademik Otsus diserahkan ke DPRD” diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/962750/25/kajian-naskah-akademik-otsus-kaltim---diserahkan-ke---dprd--1423596730/> diakses pada 21 Juli 2016 pukul 11.00 WIB.

Budi Hartono, “Inilah 6 Alasan dan 3 Catatan Kaltim Tuntut Otsus, diakses di <http://kaltim.tribunnews.com/2014/12/24/inilah-6-alasan-dan-3-catatan-kaltim-tuntut-otsus> pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 18.00 WIB.

Hyuna Asamta Asyifa, “Tidak Diperhatikan Pemerintah, 10 Desa di Kaltim Akan Bergabung dengan Malaysia”, diakses di <http://regional.kompas.com/read/2014/10/18/0530486/Tidak.Diperhatikan.Pemerintah.10.Desadi.Kaltim.Akan.Bergabung.dengan.Malaysia> pada tanggal 30 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB.

#### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004